

Akuntabilitas Keuangan Sekolah sebagai Upaya Transparansi Pengelolaan Dana Pendidikan di SMK Muhammadiyah Wonomulyo

Nursan Safitri¹, Muhammad Alwi², Albar³

^{1,2,3} Kewirausahaan, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar
¹nursan@itbmpolman.ac.id*, ²muhammadalwi@itbmpolman.ac.id, ³albar@itbmpolman.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntabilitas keuangan sekolah dalam rangka meningkatkan transparansi pengelolaan dana pendidikan di SMK Muhammadiyah Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap praktik keuangan sekolah, termasuk laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sumbangan masyarakat, serta donasi dari pihak luar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui pencatatan keuangan yang terstruktur, pelaporan rutin dalam rapat keuangan (bulanan, triwulanan, dan akhir tahun), pelaporan daring ke dinas pendidikan, serta keterlibatan aktif komite sekolah dan wali murid dalam evaluasi keuangan. Selain itu, transparansi terhadap penggunaan dana sosial seperti donasi dari alumni dan koperasi syariah memperkuat kepercayaan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan yang dilakukan tidak hanya sebatas kewajiban administratif, melainkan menjadi sarana membangun partisipasi dan pengawasan masyarakat secara aktif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem digitalisasi pelaporan dan pelatihan SDM untuk meningkatkan efisiensi dan kejelasan informasi keuangan sekolah.

Kata kunci: Akuntabilitas Keuangan, Transparansi, Dana BOS, Partisipasi Publik, Manajemen Keuangan Sekolah

Korespondensi Email : nursan@itbmpolman.ac.id
Digital Object Identifier : 10.59903/ebusiness.v5i1.191
Diterima Redaksi : 12-06-2025 | **Selesai Revisi** : 16-06-2025 | **Diterbitkan Online** : 26-12-2025

1. Pendahuluan

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan bukan hanya soal memastikan dana di sekolah dikelola secara tepat, tetapi juga menjaga tanggung jawab moral terhadap seluruh pemangku kepentingan. Akuntabilitas mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada pihak yang berkepentingan, baik secara administratif maupun sosial. Kajian terbaru menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi memainkan peran sentral dalam efektivitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Sudyartini & Wafa, 2024).

Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa kombinasi transparansi dan akuntabilitas secara simultan berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan BOS hingga lebih dari 80%, seperti yang ditemukan di berbagai sekolah menengah (Rachman et al., 2022; Indah Melati et al., 2024). Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi antara pengawasan internal yang kuat dan keterlibatan eksternal yang terbuka, terutama dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan terkait pembiayaan sekolah. Dengan demikian, penguatan akuntabilitas menjadi strategi penting untuk memastikan keberlanjutan tata kelola keuangan yang sehat dan terpercaya di lingkungan pendidikan.

Di sisi regulasi, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 ayat (1) secara tegas mengamanatkan bahwa pengelolaan dana pendidikan wajib dilakukan dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip ini bukan hanya menjadi dasar normatif, melainkan fondasi penting dalam pengelolaan keuangan pendidikan yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang berkelanjutan, efektif, dan berintegritas. Sayangnya, pada tataran implementasi, banyak sekolah masih menghadapi kesulitan dalam menginternalisasi dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara menyeluruh. Kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas di lapangan ini menunjukkan bahwa penguatan sistem manajerial, literasi



keuangan, dan pelibatan pemangku kepentingan belum optimal. Sekolah kerap kali menjalankan prosedur pelaporan hanya sebagai bentuk formalitas administratif, tanpa ada proses reflektif atau evaluatif terhadap efektivitas pengelolaan dana yang telah dilakukan. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa prinsip akuntabilitas hanya menjadi simbol, bukan budaya organisasi yang tertanam secara sistemik.

Studi empiris memperkuat kekhawatiran tersebut. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Innanawati et al. (2023) di SMK Negeri 1 Mojosoongo menunjukkan bahwa meskipun praktik transparansi dan pengawasan telah berhasil meningkatkan efektivitas pengelolaan dana BOS secara signifikan, aspek akuntabilitas justru belum menjadi perhatian utama dalam struktur manajemen sekolah. Padahal, akuntabilitas merupakan elemen vital dalam membangun kepercayaan publik dan menciptakan transparansi anggaran yang bermakna. Sebaliknya, studi lain oleh Indah Melati et al. (2024) di MIM 05 Palirangan menunjukkan bahwa akuntabilitas, meskipun berdiri sendiri tanpa transparansi yang kuat, tetap mampu menghasilkan pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS. Temuan ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas memiliki nilai strategis yang tak tergantikan dalam tata kelola keuangan sekolah. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, akuntabilitas tidak boleh hanya dilihat sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai proses berkelanjutan yang mencakup pelaporan terbuka, evaluasi berkala, serta pelibatan aktif dari orang tua, komite sekolah, dan masyarakat luas.

Di lingkungan madrasah dan sekolah swasta, praktik akuntabilitas keuangan umumnya telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Hal ini tercermin dari keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan internal, seperti kepala sekolah, bendahara, dewan guru, dan komite sekolah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengelolaan dana pendidikan. Kehadiran mereka dalam forum-forum keuangan seperti rapat bulanan atau penyusunan anggaran tahunan menjadi indikator bahwa mekanisme kontrol internal telah berjalan pada level institusional. Namun demikian, permasalahan justru muncul pada aspek keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat luas, khususnya wali Peserta Didik dan komunitas di sekitar sekolah. Publikasi laporan penggunaan dana, termasuk dana BOS maupun dana donatur, masih tergolong minim dan bersifat terbatas pada laporan verbal dalam pertemuan tertentu (Asrul et al., 2023; Musyarafah, 2024). Hal ini menimbulkan kesenjangan antara komitmen akuntabilitas internal dan kebutuhan transparansi eksternal yang seharusnya menjadi standar bersama dalam tata kelola keuangan pendidikan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat hambatan struktural dan kultural dalam pelaksanaan akuntabilitas menyeluruh di sekolah-sekolah swasta. Di satu sisi, pihak sekolah telah menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran di hadapan tim internal. Namun di sisi lain, minimnya publikasi melalui media informasi seperti papan pengumuman, buletin sekolah, atau situs web resmi menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses penuh terhadap informasi keuangan yang mereka dukung. Keterbatasan ini sering kali berasal dari kurangnya sarana teknologi yang mendukung transparansi atau rendahnya kesadaran akan pentingnya komunikasi publik dalam membangun kepercayaan. Sebagaimana ditegaskan oleh Asrul et al. (2023), penting bagi setiap lembaga pendidikan untuk tidak hanya berorientasi pada akuntabilitas administratif, tetapi juga membangun akuntabilitas sosial yang mencakup keterbukaan, dialog, dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan sekolah.

Dengan demikian, meskipun dasar hukum dan praktik internal sudah ada, masih dibutuhkan upaya sistematis berupa penerapan aplikasi pelaporan digital, pelatihan untuk pengelola keuangan sekolah, serta peningkatan keterlibatan masyarakat, agar prinsip akuntabilitas dan transparansi tidak hanya jalan formal, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif studi kasus** untuk menggali secara komprehensif mekanisme akuntabilitas keuangan di SMK Muhammadiyah Wonomulyo. Metode ini dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam terhadap konteks lokal, interaksi para pelaku, dan realitas praktik pengelolaan dana sekolah. Data dikumpulkan melalui **wawancara semi-terstruktur** dengan kepala sekolah, bendahara, ketua komite, dan wali Peserta Didik; **observasi partisipatif** dalam pelaksanaan rapat evaluasi keuangan; serta **studi dokumentasi** yang mencakup buku kas harian, laporan BOS/RAPBS, dan notulen rapat. Analisis data dilakukan secara interaktif menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña—dimulai dengan reduksi data melalui coding, dilanjutkan dengan penyajian data melalui matriks dan diagram, serta diakhiri dengan penarikan

kesimpulan serta triangulasi antara wawancara, observasi, dan dokumen untuk memperkuat validitas temuan (Yuliansyah et al. 2021).

Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini untuk memilih SMK Muhammadiyah Wonomulyo sebagai lokasi studi, karena sekolah tersebut memiliki struktur pengelolaan keuangan yang terbuka dan kombinasi sumber dana yang beragam (BOS, SPP, donasi alumni, Lazismu, koperasi syariah). Pendekatan ini sesuai dengan metode studi kasus yang telah diterapkan dalam penelitian sebelumnya, yang menunjukkan bahwa sekolah dengan variasi sumber pendanaan dapat memberikan pemahaman mendalam terhadap efektivitas mekanisme akuntabilitas (Somantri & Salam, 2021). Penggunaan *purposive sampling* memastikan bahwa informan yang dipilih—yakni kepala sekolah, bendahara, ketua komite, dan perwakilan wali Peserta Didik—memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan dan mampu memberikan wawasan kaya tentang sistem pertanggungjawaban yang berjalan.

Pedoman wawancara dikembangkan berdasarkan indikator utama akuntabilitas keuangan, seperti proses pencatatan, pelaporan, partisipasi publik, dan integrasi teknologi dalam pelaporan keuangan. Instrumen wawancara semi-terstruktur ini dirancang untuk memungkinkan eksplorasi mendalam serta tanggapan reflektif dari informan, sehingga dapat mengungkap dinamika dan hambatan dalam praktik akuntabilitas sekolah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip wawancara kualitatif yang fleksibel namun sistematis, sebagaimana diuraikan dalam studi Nugroho et al. (2023).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan kunci di SMK Muhammadiyah Wonomulyo, antara lain kepala sekolah (Nuraeni, S.Pd), bendahara sekolah (Arfa Bakri, S.Pd), ketua komite sekolah (Syamsuddin S.Ag., M.Pd.I), dan wali Peserta Didik (Sitti Aminah), diperoleh gambaran bahwa sistem akuntabilitas keuangan di sekolah ini telah dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pencatatan Keuangan Terstruktur Menurut penjelasan bendahara sekolah, semua transaksi keuangan dicatat dalam Buku Kas Harian dan Buku Kontrol Keuangan secara berkala. Catatan tersebut memuat informasi rinci mengenai aliran pemasukan dan pengeluaran dana, baik yang bersumber dari BOS, SPP, maupun dana sosial seperti donasi dari alumni. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap dana yang masuk dan keluar dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Pelaporan dan Rapat Rutin

Dari wawancara dengan kepala sekolah dan ketua komite, terungkap bahwa SMK Muhammadiyah Wonomulyo melaksanakan tiga jenis rapat keuangan: (1) Rapat bulanan, yang membahas laporan kas bulanan dan pengeluaran harian sekolah, (2) Rapat triwulanan, dilakukan setiap kali penerimaan dana BOS, dan dihadiri oleh kepala sekolah, guru, bendahara, serta perwakilan komite, (3) Rapat akhir tahun ajaran, yang bertepatan dengan penerimaan raport siswa dan dilaksanakan bersama wali Peserta Didik untuk menyampaikan laporan akhir keuangan sekolah secara terbuka.

Pelaporan dana pemerintah secara daring, dana BOS dilaporkan secara langsung melalui sistem digital (online) ke Dinas Pendidikan Kabupaten Polewali Mandar. Menurut Nirwana, laporan ini mengikuti format resmi dan menjadi bagian dari upaya transparansi kepada pemerintah sebagai pemberi dana, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan.

Partisipasi komite dan wali peserta didik, komite sekolah tidak hanya terlibat dalam perencanaan anggaran, tetapi juga dalam proses evaluasi dan pengawasan. Ketua komite menegaskan bahwa rapat komite menjadi forum penting dalam menjaga sinergi antara pihak sekolah dan masyarakat. Wali Peserta Didik juga rutin diundang dalam rapat, terutama saat pembagian raport, di mana mereka diberikan informasi keuangan secara terbuka dan diajak berdiskusi mengenai program pendanaan untuk tahun berikutnya.

Transparansi dana sosial dan donasi, sekolah mendapatkan dukungan dana dari Lazismu Polman, koperasi syariah sekolah, alumni, dan donatur tidak tetap. Dana-dana ini dicatat dan dilaporkan secara khusus dalam forum tahunan.

Wali Peserta Didik juga dilibatkan dalam penggunaan dana untuk kegiatan sosial, seperti pemberian subsidi kepada siswa kurang mampu dan pengadaan fasilitas umum.

Keseluruhan sistem ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas bukan hanya dijalankan sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai wujud kepercayaan sosial yang dibangun secara bertahap dan berkesinambungan antara sekolah dan masyarakat.

3.2 Pembahasan

Temuan hasil wawancara menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan di SMK Muhammadiyah Wonomulyo telah dikembangkan melalui pendekatan partisipatif dan transparan. Mekanisme pelaporan rutin dan pencatatan keuangan yang disiplin menjadi fondasi utama dalam menjaga kredibilitas keuangan sekolah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Lubis et al. (2024), yang menyebutkan bahwa akuntabilitas yang baik ditandai oleh keterlibatan aktif bendahara, kepala sekolah, dan partisipasi masyarakat melalui komite sekolah dalam setiap proses pengambilan keputusan keuangan.

Lebih lanjut, penggunaan sistem pelaporan daring kepada pemerintah menunjukkan integrasi teknologi dalam proses akuntabilitas. Sistem ini berfungsi untuk mempercepat proses pelaporan, memudahkan monitoring dari pemerintah, serta menekan kemungkinan adanya praktik penyalahgunaan dana. Seperti yang ditegaskan oleh Nur & Hanif (2024), digitalisasi laporan keuangan sekolah dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik, terutama jika diikuti oleh pelatihan SDM yang memadai.

Partisipasi komite dan wali Peserta Didik dalam perencanaan dan evaluasi anggaran juga mencerminkan model manajemen berbasis masyarakat. Pendekatan ini diyakini lebih efektif dalam menciptakan rasa kepemilikan terhadap keberlangsungan sekolah dan program-programnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Weny (2024), partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana BOS di SMAN 8 Kediri mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dan mendorong transparansi penggunaan dana.

Selain itu, keterbukaan terhadap penggunaan dana sosial seperti donasi dan subsidi pendidikan menunjukkan bahwa sekolah ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan dana formal (BOS dan SPP), tetapi juga pada pengelolaan dana berbasis solidaritas sosial. Hal ini menguatkan argumentasi Gervas & Kambuga (2025), bahwa sistem akuntabilitas yang berfungsi tidak hanya berorientasi pada pengawasan vertikal (pemerintah), tetapi juga harus memperhatikan pengawasan horizontal (masyarakat dan pemangku kepentingan lokal).

Dengan demikian, praktik akuntabilitas keuangan di SMK Muhammadiyah Wonomulyo telah menunjukkan keseimbangan antara regulasi formal dan pendekatan partisipatif, dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung utama. Keberhasilan ini dapat dijadikan model penerapan akuntabilitas bagi sekolah-sekolah swasta lain yang memiliki kondisi serupa dalam hal sumber pendanaan dan tantangan sosial-ekonomi masyarakatnya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di SMK Muhammadiyah Wonomulyo, dapat disimpulkan bahwa praktik akuntabilitas keuangan di sekolah ini telah dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan. Sekolah menerapkan berbagai mekanisme seperti pencatatan keuangan terstruktur, pelaporan keuangan rutin melalui rapat bulanan dan triwulanan, serta pelaporan daring ke pemerintah. Selain itu, keterlibatan komite sekolah dan wali Peserta Didik dalam proses evaluasi serta transparansi penggunaan dana sosial dan donasi menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah melekat dalam tata kelola keuangan sekolah.

Implementasi akuntabilitas di SMK Muhammadiyah Wonomulyo tidak hanya terbatas pada kewajiban administratif, tetapi telah berkembang menjadi bentuk tanggung jawab sosial yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan pendidikan yang menekankan pentingnya keadilan, efisiensi, transparansi, dan partisipasi. Dengan memadukan pelibatan pemangku kepentingan dan pemanfaatan teknologi informasi, sekolah ini mampu membangun sistem pertanggungjawaban keuangan yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga berintegritas secara sosial.

Praktik ini dapat menjadi model inspiratif bagi sekolah-sekolah lain, terutama dalam konteks pengelolaan dana pendidikan berbasis masyarakat.

Daftar Rujukan

- Asrul, H., Nianty, D. A. & Permatasari, Y. (2023). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS pada MIM Tamacinna*. Jurnal Manuver: Akuntansi dan Manajemen. e-jurnal.nobel.ac.id
- Indah Melati, Haryanto & Arifatin, F. W. (2024). *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS di MIM 05 Palirangan*. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin. [mail.jonedu.org+3ejournal.unibba.ac.id+3ejournal.unibba.ac.id+3sejurnal.com](mailto:jonedu.org+3ejournal.unibba.ac.id+3ejournal.unibba.ac.id+3sejurnal.com)
- Innanawati, Dewi, M. W., & Pratiwi, D. N. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas, Pengawasan dan Transparansi terhadap Efektivitas BOS di SMK Negeri 1 Mojosongo*. Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis. jurnal.jtemap.net
- Musyarafah, S. (2024). *Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana BOS di MTsN 1 Kota Banjarmasin*. Repository Unukase. repository.unukase.ac.id
- Nugroho, H. S., Prasetyo, A., & Rahmawati, Y. (2023). *Model akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan berbasis partisipatif di sekolah dasar*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 15(1), 44–57. <https://doi.org/10.21831/jmp.v15i1.59631>
- Rachman, D., Setiawan, D., & Nugraha, R. M. T. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana BOS di SMA SASAMA*. Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA. ejournal.unibba.ac.id+1ejournal.unibba.ac.id+1
- Sudyartini, S. & Wafa, Z. (2024). *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas BOS di Yogyakarta*. Journal on Education. mail.jonedu.org
- Somantri, M., & Salam, R. (2021). *Studi kasus akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana BOS di sekolah dasar*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 12(3), 512–526. <https://doi.org/10.18202/jamal.2021.12.3.512>
- Yuliansyah, M., Degeng, I. N. S., Wiyono, B. B., Supriyanto, A., Jarkawi, J., & Herman, M. (2021). *Accountability Guidance and Counseling Program In the City of Banjarmasin Vocational School*. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 93-104.